

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gambaran penduduk atau statistik dan data kependudukan sangat diperlukan terutama oleh para pembuat kebijakan, baik kalangan pemerintah maupun nonpemerintah. Data dan statistik kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui gambaran sosial dan ekonomi penduduk di suatu negara. Dari segi ketenagakerjaan, misalnya keadaan penduduk dapat dilihat dari persentasenya menurut bidang pekerjaan utama (pertanian, industri, dan jasa), status pekerjaan (formal dan informal), atau jenis kegiatan (bekerja, sekolah, atau mencari pekerjaan).

Setelah mengetahui gambaran penduduk dari berbagai aspek, pemerintah berkewajiban untuk memperbaiki dan mengembangkan demi pertumbuhan yang semakin baik. Berdasarkan pada pengamalan sila kelima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka hakikat pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya

untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat. Serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Ketika pemerintah akan melaksanakan pembangunan tentu dibutuhkan dana dari APBN yang salah satunya berasal dari pajak. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Soemitro dan Sugiharti, 2010: 1). Berikut data penerimaan pajak tahun 2008-2012 dan pertumbuhannya secara nasional.

Tabel 1 Data Jumlah Penerimaan Negara dan Pertumbuhannya 2008-2012
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Pajak		Penerimaan Negara Bukan Pajak		Hibah		Jumlah	
	Penerimaan	%	Penerimaan	%	Penerimaan	%	Penerimaan	%
2008	658,70	0	320,60	0	2,30	0	981,60	0
2009	619,92	-6	227,17	-29	1,67	-27	848,76	-13
2010	723,31	17	268,94	18	3,02	81	995,27	17
2011	873,87	21	331,47	23	5,25	74	1210,59	22
2012	980,52	12	351,80	6	5,79	10	1338,11	10

Sumber : Departemen Keuangan, diakses pada 6/12/2013
(www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/lkpp%202012%20Audite)

Dari tabel di atas tersaji laporan penerimaan negara dari sisi Pajak, Penerimaan Bukan Pajak dan Hibah dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dan memegang peranan yang sangat penting. Sesuai dengan kebutuhan negara, penerimaan pajak telah meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009 penerimaan pajak menurun 6% dari tahun 2008, namun terus

mengalami peningkatan sejak tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak.

Setiap tahun, wajib pajak berkewajiban menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Sedangkan sarana untuk menyetor pajak ke bank atau kantor pos digunakan formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan artikel Sensus Pajak Nasional (www.pajak.go.id/sensus-pajak-nasional.htm diakses pada tanggal 17/9/2013) saat ini diketahui sedikit sekali Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak saat ini ternyata dihadapkan pada masih belum optimalnya peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya terhadap negara. Pada tabel 2 di bawah ini dapat dilihat pertumbuhan dan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2010 dan 2011.

Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Laport SPT	Tingkat Kepatuhan
2010	15.911.576	8.202.309	52%
2011	22.319.073	9.891.120	44%

Sumber: www.finance.detik.com dalam dewinta, diakses pada 13/05/2014

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks dilihat dari banyak perspektif. Franzoni (1999, dalam [www.pajak.go.id/content /article/ kompleksitas-kepatuhan-pajak](http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak) diakses pada tanggal 29/1/2014) menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan SPT dengan tepat waktu dan membayar

pajaknya dengan tepat waktu. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan masih tergolong rendah. Pada tahun 2011 tingkat pelaporan SPT Tahunan menurun dari tahun 2010 meskipun jumlah wajib pajak mengalami peningkatan. Tingkat pelaporan SPT Tahunan di tahun 2010 yaitu 52% kemudian turun menjadi 44% di tahun 2011. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan diantaranya yaitu tingkat kesadaran, tingkat pemahaman wajib pajak, kondisi keuangan orang pribadi maupun perusahaan, iklim organisasi (Saraswati, 2012: 5)

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian melakukan upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar dengan cara Sensus Pajak Nasional (SPN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional pada tanggal 12 September 2011. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sensus Pajak Nasional mempunyai sasaran agar wajib pajak yang belum ber-NPWP, maka bisa diberikan NPWP. Bagi yang belum bayar pajak agar membayar pajak, yang belum menyampaikan SPT agar menyampaikan SPT, dan yang memiliki utang pajak agar melunasinya ([www.pajak.go.id /content/mengenal-sensus-pajak-nasional](http://www.pajak.go.id/content/mengenal-sensus-pajak-nasional) diakses pada tanggal 21/11/2013).

Sensus Pajak pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Sungguh tidak adil apabila ada sebagian masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih banyak lagi yang belum membayar pajak. Masyarakat haruslah memiliki rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan seluruh masyarakat bisa mewujudkan rasa bangga bayar pajak. Sensus Pajak Nasional (SPN) dilakukan dalam rangka memperluas basis pajak yaitu berupa pengumpulan data perpajakan. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya menjangkau seluruh potensi perpajakan dalam rangka Tri Dharma Perpajakan (www.pelayanan-pajak.blogspot.com/2011/09/sensus-pajak-nasional-pmk-149-pmk-032011.html diakses pada tanggal 17/9/2013), yaitu:

1. Agar seluruh wajib pajak terdaftar;
2. Agar seluruh objek pajak dikenakan pajak;
3. Agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dilaksanakan tepat waktu dan tepat jumlah

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang hampir mencapai 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di /kawasan Jawa Timur (sumber: id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya diakses pada tanggal 30/10/2013).

Jika melihat dari hasil sensus penduduk, maka proyeksi pertumbuhan penduduk Surabaya dari yang sebelumnya di tahun 2010 sebesar 2.738.193 menjadi 2.757.232 di tahun 2011(sumber: www.surabaya.go.id/files.php?id=2065 diakses

pada 29/1/2014). Sesuai profil kabupaten/kota Surabaya Jawa Timur (sumber: www.ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/surabaya.pdf diakses pada tanggal 30/10/2013) sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan.

Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng terletak di pusat kota yang sebagian besar merupakan wilayah perkantoran dan pertokoan serta pemukiman padat penduduk, dari sini dapat diketahui bahwa sektor perdagangan dan kegiatan jasa adalah sektor yang menonjol dan strategis berpengaruh besar terhadap wilayah ini terutama sosial ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng pada tahun 2010-2011 dan pertumbuhannya sebelum pelaksanaan kegiatan Sensus Pajak Nasional yaitu:

Tabel 3 Data Jumlah Wajib Pajak dan Pertumbuhannya di KPP Pratama Surabaya Genteng

Jenis Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak		Pertumbuhannya
	2010	2011	%
Badan	3.931	4.129	5
Orang Pribadi	10.674	11.284	6
Jumlah	14.605	15.413	5

Sumber: data diolah dari Master File Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Genteng 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2010 hingga 2011 jumlah wajib pajak Orang Pribadi (OP) dan badan mengalami peningkatan. Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak OP lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan wajib pajak badan. Wajib pajak OP mengalami pertumbuhan 6% sedangkan wajib pajak badan mengalami pertumbuhan 5%. Berikut data

penerimaan pajak dan pertumbuhannya di KPP Pratama Surabaya Genteng sejak tahun 2007 hingga 2011.



Data penerimaan pajak dan pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Penerimaan Pajak Dan Pertumbuhannya Keadaan Per 1 Januari 2012

Dalam Jutaan Rupiah

Tahun	PPh		PPN & PPnBM		PBB & BPHTB		Pajak Lainnya		Jumlah	
	Penerimaan	(+/-) %	Penerimaan	(+/-) %	Penerimaan	(+/-) %	Penerimaan	(+/-) %	Penerimaan	(+/-) %
2007	667.277	0	215.764	0	0	0	4.920	0	887.961	0
2008	339.291	-49	84.126	-61	34.685	0	1.028	-79	459.130	-48
2009	272.926	-20	63.565	-24	63.214	82	714	-30	400.419	-13
2010	243.226	-11	78.449	23	0	(100)	1.766	147	323.441	-19
2011	366.586	51	118.218	51	0	-	892	-50	485.696	50

Sumber: Monografi Fiskal 2012 KPP Pratama Surabaya Genteng

Namun, pertumbuhan jumlah wajib pajak yang meningkat tidak diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak terbesar yaitu pada Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dikarenakan PPh merupakan pajak yang sangat umum dimiliki oleh semua orang berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sejak tahun 2008 hingga 2010 tingkat penerimaan PPh terus menurun dari tahun 2007, namun mengalami peningkatan di tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mengalami penurunan.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu kesadaran dari wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya dalam membayar pajak bahwa penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pembangunan negara. Selain itu wajib pajak yang membayar pajak juga masih ada yang tidak jujur. Kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak sangatlah penting karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajak sebenarnya tanpa ada manipulasi. Selain itu hasrat untuk membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi. Pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan kedisiplinan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, karena kedisiplinan berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya. Sedangkan kondisi keuangan

adalah kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas.

Berdasarkan tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak mengalami peningkatan namun pertumbuhan penerimaan pajak pada PPh masih mengalami naik turun. Menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Oleh karena itu pemerintah melakukan kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) dengan tujuan meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak yaitu pada PPh, meningkatkan pelaporan SPT Tahunan, dan pemutakhiran data WP. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pembayaran pajak terutang tepat jumlah dan pelaporan SPT tepat waktu. Pelaksanaan SPN pada tahun 2011 dan 2012 dapat dikatakan efektif jika tujuan SPN telah tercapai yaitu meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan pelaporan SPT, dan pemutakhiran data WP. Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya (Siagian dalam Yani, 2013:2). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Evaluasi Atas Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Nasional Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Surabaya Genteng)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan sensus pajak nasional di KPP Pratama Surabaya Genteng yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012?
2. Bagaimana deskripsi tentang kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah pelaksanaan sensus pajak nasional?
3. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan sensus pajak nasional terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan sensus pajak nasional pada tahun 2011 dan 2012
2. Untuk mengetahui deskripsi tentang kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah pelaksanaan sensus pajak nasional
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan sensus pajak nasional terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap:

1. Aspek Praktis

Sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional mulai dari kegiatan pelaksanaannya sampai kendala-kendala yang terjadi sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dan jumlah wajib pajak meningkat.

2. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan dibidang perpajakan, diantaranya yaitu PPh dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga kelak dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pembanding dengan kajian yang serupa di masa lalu maupun di masa yang akan datang mengenai pelaksanaan sensus pajak nasional yang dilakukan pada tahun 2011 dan 2012.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka akan dijabarkan secara singkat isi dari keseluruhan bab-bab yang ada dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya yaitu sensus pajak nasional, PPh, dan kepatuhan wajib pajak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrument penelitian, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan yang dihasilkan dari proses penelitian di lapangan, yang meliputi penyajian data serta analisis dan interpretasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dari semua hasil penelitian dan juga saran yang mungkin dijadikan sebagai masukan untuk penelitian berikutnya.